

**PENGARUH PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
AUDITOR INTERN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

ETRAWITA
2008/00392

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

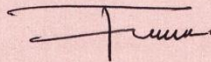
**PENGARUH PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN AUDITOR
INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada DPKAD Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatra
Barat)**

Nama : Etrawita
BP/NIM : 2008/00392
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012

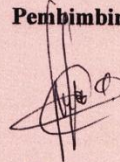
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



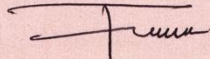
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak
NIP.19801019 200604 2 002

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

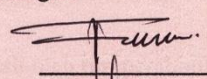
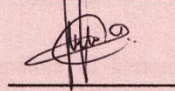
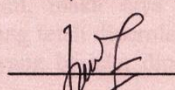
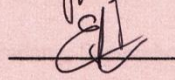
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN AUDITOR
INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada DPKAD Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatra
Barat)**

Nama : Etrawita
NIM/BP : 00392/2008
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 23 Juli 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak	
3. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
4. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M. Si, Ak	

ABSTRAK

Etrawita (2008/00392) Pengaruh Peran pengelola Keuangan Daerah dan Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, S.E, M.sc, Ak

Pembimbing II: Charoline Cheisviyanny, S.E, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh peran pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, dan 2) pengaruh auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPKAD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *total sampling*. Responden dalam penelitian ini sebanyak 76 responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) peran pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,737 > 1,6741$ ($\text{sig } 0,008 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima, dan 2) auditor intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,963 < 1,6741$, ($\text{sig } 0,340 > \alpha 0,05$) yang berarti H_2 ditolak.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai peran pengelola keuangan daerah dan auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah agar kinerja pemerintah lebih dapat ditingkatkan. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kinerja pemerintah daerah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Peran Pengelola Keuangan Daerah dan Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Charoline Cheisviyanny SE, M. Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan ibu, Kakak beserta Adik dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori.....	13
1. Kinerja Pemerintah Daerah.....	13
2. Peran Pengelola Keuangan.....	24
3. Auditor Intern.....	33

B. Penelitian Terdahulu.....	43
C. Pengembangan Hipotesis.....	44
D. Kerangka Konseptual.....	47
E. Hipotesis.....	48

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Populasi dan Sampel.....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Variabel Penelitian.....	51
F. Pengukuran Variabel.....	53
G. Instrumen Penelitian.....	54
H. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	56
I. Hasil Uji Coba Instrumen.....	57
J. Uji Asumsi Klasik.....	58
K. Teknik Analisis Data.....	59
L. Definisi Operasional.....	63

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	65
B. Demografi Responden.....	66
1. Berdasarkan Jabatan.....	66
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
3. Berdasarkan Masa Kerja.....	67

4. Berdasarkan Usia.....	68
5. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	69
D. Statistik Deskriptif.....	74
D. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	75
E. Uji Asumsi Klasik.....	77
F. Analisis Data.....	80
G. Uji Hipotesis.....	82
H. Pembahasan.....	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Daftar DPKAD Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi SUMBAR	50
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan.....	54
3. Instrumen Penelitian.....	55
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian.....	58
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuisi.....	65
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jabataz.....	66
7. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
8. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerj.....	68
9. Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	68
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
11. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Pengelola Keuangan Daerah.....	70
12. Distribusi Frekuensi Variabel Auditor Intern.....	71
13. Distribusi Frekuensi Kinerja Pemerintah Daerah.....	73
14. Distribusi Frekuensi Kinerja Pemerintah Daerah.....	73
15. Descriptive Statistics.....	75
16. <i>Coreected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian.....	76
17. Nilai <i>cronbach's alpha</i> Interumen Penelitia.....	76
18. Uji Normalitas.....	78
19. Uji Multikolinearita.....	79

20. Uji Heterokedasitisita.....	80
21. Adjusted <i>R Squar</i>	80
22. Koefisien Regresi.....	91
23. Uji F	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka	
Konseptual.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	95
Lampiran 2	UjiValiditas Dan Reliabilitas.....	101
Lampiran 3	Tabulasi Kuesioner Penelitian.....	107
Lampiran 4	Tabel Frekwensi.....	112
Lampiran 5	Hasil Analisis Data.....	116
Lampiran 6	Surat Penelitian.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang dimulai beberapa tahun yang lalu telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 melahirkan paradigma baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Adanya reformasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap manajemen keuangan daerah. Perubahan terhadap manajemen keuangan daerah, setidaknya memiliki dua alasan, yaitu: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Pelimpahan wewenang tersebut menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat aparat di daerah, bahkan sampai ke hirarki yang lebih rendah. Hal ini

berakibat pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh para pejabat di daerah Widodo dalam (Rohman, 2007).

Perubahan aspek reformasi yang paling dominan adalah pada aspek pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode.

Selain itu, tuntutan atas perubahan organisasi publik baik secara individu ataupun anggota kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukan kepada pemerintah daerah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada organisasi. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi, dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan secara efektif dan

efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya dengan menggunakan informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial.

Menurut Gaspers (2000) penilaian kinerja pemerintah secara komprehensif dapat menggunakan sistem pengukuran kinerja *Balance Score Card* (BSC). Penulis tertarik menggunakan BSC karena alat ukur ini memiliki keunggulan. Keunggulan BSC adalah lebih komprehensif dengan alat ukur lain, alat ukur ini mempunyai empat perspektif yang saling berkaitan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. *Balance Score Card* tidak hanya mengukur aspek finansial tetapi juga aspek non finansial.

Perspektif keuangan merupakan kemampuan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan keuangan publik yang dibelanjakan dengan ekonomis, efektif dan efisien. Perspektif pelanggan merupakan kemampuan instansi pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan bagi masyarakat. Perspektif proses internal dapat dilihat dengan bagaimana hubungan atasan dengan bawahan dalam membuat keputusan dan kebijakan. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan pengembangan infrastruktur yang mencakup sumber daya manusia, sistem dan prosedur.

Pendekatan BSC memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem

manajemen strategis ke dalam seperangkat ukuran yang terpadu dan berorientasi pada panduan strategis ke depan (Kaplan & Norton, 2000).

Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik instansi pemerintah dan untuk menilai kinerja perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006). Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Inspektorat) maupun pemeriksa eksternal (BPK).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasmo, 2002). Hal tersebut merupakan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk

lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan.

Pengelola keuangan daerah berfungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, (Halim, 2006). Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran merupakan salah satu masalah penting, Kenis dalam Herminingsih (2010) mengemukakan anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharap dan direncanakan dalam periode tertentu dimasa yang akan datang. Mardiasmo (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Di sisi lain, untuk mewujudkan kinerja Pemda yang sesuai dengan *value for money* (*economy, efficiency, effective*), perlu peningkatan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan di lingkungan Pemda (Mardiasmo, 2002).

Selain faktor peran pengelola keuangan daerah yang merupakan pihak yang bertanggungjawab membuat laporan tersebut, pihak pengawas yaitu auditor internal juga akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Peran dari seorang auditor intern pemerintah juga akan sangat berpengaruh karena sebagai pihak yang mengawasi mereka harus memastikan bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan prosedur sehingga kualitas informasi bisa terjaga. Seperti dinyatakan dalam konversi nasional akuntansi 2009 pemaparan “ peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam pemberdayaan kapasitas pemerintahan oleh kepala bidang akuntansi negara yaitu bahwa peran kunci

dari auditor internal pemerintah untuk dapat memberikan keyakinan kepada eksekutif dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemerintah serta auditor eksternal dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Jadi kualitas laporan yang dihasilkan juga akan tergantung dari peran auditor internal dalam melakukan pemeriksaan ataupun pengarahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan sebuah laporan dengan kualitas yang benar-benar memadai dan bermanfaat bagi para pengguna informasi tersebut.

Sawyer's (2005) mendefenisikan audit internal sebagai aktivitas pemberian keyakinan objektif yang independen dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Menurut IIA peran auditor internal meliputi: 1) Tujuan kewenangan dan tanggungjawab, 2) Memilih independensi dan objektivitas, 3) Keahlian dan kecermatan fungsional, 4) program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal, 5) Pengelolaan fungsi audit internal, 6) Lingkup penugasan, 7) Pelaksanaan penugasan, 8) Komunikasi hasil penugasan, 9) Pemantauan tindak lanjut, 10) Resolusi penerimaan resiko dan manajemen. Untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan *value for money* (*economy, efficiency, effective*) perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah di lingkungan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Pelaksanaan pemeriksa keuangan secara internal tentu tidak dapat mengelak dari keharusan memperbandingkan antara yang seharusnya terjadi

dan sungguh-sungguh terjadi. Hal itu dilakukan baik dengan mengacu pada rencana, aturan-aturan, maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Walaupun demikian kegiatan pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan, sehingga dapat ditentukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan. Adapun pemeriksa keuangan secara internal yang dimaksud adalah inspektorat daerah. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah, inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas menjadi pengawas sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apabila suatu daerah diawasi dalam bekerja, maka mereka akan bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan ini jelas dan nyata bahwa inspektorat daerah sebagai pengawas daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Inspektorat daerah dibutuhkan oleh kepala daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, kesuksesan pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya. Tujuan utama dari pengawasan

tidak hanya melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik guna meningkatkan kinerja.

Berdasarkan Laporan Hasil Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) pada tahun 2011, BPK menemukan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu adanya kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang pada 20 SKPD, yakni sebesar Rp 48,1 miliar, namun realisasi belanja modal tersebut sebesar Rp 42,1 miliar. Kemudian ada penganggaran belanja barang untuk pembangunan kantor penghubung, senilai Rp 25,8 miliar, namun penganggarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan penyajian konstruksi dana pengerjaan gedung kantor penghubung sebesar Rp 26,6 miliar, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 6,3 miliar. Selain itu ada penyajian nilai aset tanah sebesar Rp 27,8 miliar, hal tersebut juga dinilai tidak wajar dan tidak konsisten dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). BPK RI juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti penggunaan langsung atas penerimaan retribusi daerah pada beberapa SKPD sebesar Rp 2,2 miliar. Temuan yang lain juga ada pada pelembagaan dana bergulir yang dikelola, tapi mengalami kredit macet. Nilainya mencapai Rp 8,4 miliar, dan jumlah tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 431 juta serta sistem pengendalian internal,

terutama mengenai administrasi dan masalah aset, juga masih sangat lemah" (www. Haluan Padang. Com.di akses 2/12/2011).

Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah menilai kinerja sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola administrasi keuangan dan anggaran masih belum memuaskan dan transparan. Kinerja sebagian besar pemerintah daerah dalam mengelola keuangan masih belum memuaskan, hal ini dilihat dari ikhtisar hasil pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2011. Bahkan kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga semakin menurun. Selain menyoroti masalah kinerja pengelolaan keuangan yang dinilai kurang transparan, Emma juga mengkritisi masalah ketidaktertiban administrasi di sejumlah instansi pemerintah, (Metro, Headline Minangkabau News di akses 2/12/2011).

Namun, fenomena di atas menunjukkan bahwa lemahnya peran pengelola keuangan daerah dan auditor intern menyebabkan kinerja pemerintah daerah tidak efisien dan efektif, ini ditandai dengan adanya kelemahan terhadap penyusunan laporan keuangan yaitu terjadinya kesalahan penganggaran atas belanja barang dan adanya penyajian nilai aset yang tidak wajar dan konsisten. Jadi, untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka diperlukan peningkatan peran pengelola keuangan daerah dan auditor intern di pemerintah daerah.

Dalam penelitian Rohman (2007) di Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa peran manajerial pengelola

keuangan daerah dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian Herminingsih (2009) di Pemda kabupaten Demak menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian Natalia (2010) di kabupaten Tegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional dan peran manajerial pengelola keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Pengelola Keuangan Daerah dan Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada DPKAD Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatra Barat)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh peran pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengaruh auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Sejauhmana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Sejauhmana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah da

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu sejauhmana pengaruh peran pengelola keuangan daerah dan auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh peran pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengaruh auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok di atas, maka secara spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh peran pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Pengaruh auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah

F. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh peran pengelola keuangan daerah dan auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Universitas Negeri Padang.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja Pemerintah Daerah

a. Defenisi Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi (Mahsun, 2006). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur.

Menurut Indra (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Setidaknya ada empat elemen kinerja, yaitu (1) hasil kerja yang dicapai secara individual atau institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok; (2) dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang tersebut; (3) pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang ditetapkan; (4) pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum Lijan dalam Emil (2010)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja satuan kerja perangkat daerah merupakan pengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai.

b. Penilaian dan Pengukuran Kinerja

a. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, untuk merangsang perilaku yang semestinya dan yang diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja.

Penilaian kinerja menurut Sri (2009), yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2009) untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001), yaitu

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

b. Pengukuran Kinerja

Dalam membahas kinerja suatu organisasi, tidak terlepas dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya kinerja yang tinggi maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai atau akan diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas yang dapat dilaksanakan oleh organisasi, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).

- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat di telusuri perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk pencapaian *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Indra (2006), manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang telah disepakati.
- 5) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal (pemerintah daerah) dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan untuk dilakukan tindakan perbaikan. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tolak ukur adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kerja mampu melaksanakan tupoksinya. Tolak ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Sedangkan capaian kinerja menurut Ahmad (2008) adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan (SAP, pag. 27).

Pendekatan BSC memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dalam sistem manajemen strategis atau ke dalam seperangkat ukuran kerja yang terpadu dan berorientasi pada pandangan strategis ke depan (Kaplan&Norton). Selain memberikan penekanan pada pencapaian tujuan keuangan, pendekatan BSC juga membuat faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan keuangan tersebut. Dalam hal ini Kaplan dan Norton (2000) juga memperkenalkan suatu model pengukuran kinerja yang baru yang disebut BSC. *Balance Score Card* melengkapi ukuran kinerja keuangan dengan membutuhkan tiga perspektif yaitu: perspektif pelanggan, perspektif proses internal perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Menurut Gaspers (2000) *Balance Score Card* memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategi dengan menggunakan empat perspektif yaitu: Perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. BSC

diperkenalkan untuk memecahkan masalah tentang keterbatasan manajemen yang mengukur finansial saja. Pengukuran finansial hanya melaporkan hasil (*outcome*), tetapi tidak menginformasikan faktor kinerja masa depan. Supaya sukses, sebuah organisasi harus membuat pengukuran non finansial, seperti hubungan dengan pelanggan, produk dan pelayanan yang inovatif, respon yang baik atau teknologi informasi dan database, kemampuan pegawai keahlian dan motivasi. Dengan demikian, BSC merupakan alat yang dibutuhkan oleh instansi untuk mengarahkan pada kesuksesan di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BSC merupakan suatu keseimbangan (*balanced*) antara outcome yang diinginkan dengan faktor pendorong dari outcome tersebut. Disamping mengukur keseimbangan kinerja, BSC juga merupakan pengukuran kinerja yang inovatif, serta pengukuran kinerja yang menekankan kepada tujuan organisasi yang saling berhubungan antara tujuan primer dan sekunder (Gaspers:2002)

1) Perspektif Keuangan

Balance Score Card menggunakan perspektif keuangan karena ukuran kinerja dan perspektif keuangan ini sangat penting dalam memberikan petunjuk apakah strategi, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan kinerja instansi pemerintah, (Kaplan&Norton,

2000). Pada organisasi pemerintahan, ukuran finansial merupakan seberapa jauh organisasi pemerintah mengukur keberhasilan mereka melalui kemampuan melakukan pengeluaran dalam sejumlah anggaran dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Fokus utama pemerintah bukan pada pencapaian finansial, tetapi berfokus kepada pemenuhan kebutuhan publik (dengan menggunakan cara-cara yang efisien). Sasaran utama perspektif keuangan diarahkan pada pencapaian efisiensi penggunaan anggaran, dengan tetap berada dalam kerangka pengembangan kualitas output dan layanan organisasi, serta pelayanan personal terhadap kebutuhan publik.

2) Perspektif Pelanggan

Dalam perspektif pelanggan BSC, para pemimpin instansi mengidentifikasi pelanggan dengan segmennya dimana unit instansi tersebut akan bersaing dan berbagi ukuran kinerja unit instansi didalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik dari keberhasilan strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Ukuran utama tersebut antara lain terdiri dari kepuasan pelanggan, akuisisi pelanggan baru, dan pangsa segmen sasaran.

Dapat dikatakan bahwa perspektif pelanggan disini adalah pemimpin instansi dari unit suatu instansi untuk

mengartikulasikan strategi yang berorientasi kepada pelanggan dan segmen sasaran yang akan memberi keuntungan masa depan yang lebih besar. Dengan demikian, organisasi pemerintah harus mengetahui pelayanan yang mereka berikan apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga warga negara dan pembayar pajak khususnya. Dalam hal ini pejabat pemerintah dalam memberikan layanan publik harus efektif dan efisien, sehingga masyarakat betul-betul merasakan kepuasan pelayanan itu, sehingga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3) Perspektif Proses Internal

Dalam perspektif proses internal, para pimpinan instansi mengidentifikasi sebagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik. Ukuran proses internal yang akan berdampak besar kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangannya. Perspektif proses internal ini mengemukakan perbedaan ukuran kinerja yang mendasar antara pendekatan tradisional dengan pendekatan BSC. Dimana pendekatan tradisional berusaha memantau dan meningkatkan proses bisnis yang ada saat ini. Pendekatan ini memungkinkan untuk melampaui ukuran kinerja keuangan dalam hal pemanfaatan alat ukur yang mendasar kepada mutu dan waktu.

Tetapi semua ukuran ini masih berfokus kepada peningkatan proses internal saat ini, (Kaplan & Norton, 2000)

Dengan demikian pemerintah sebagai *publik servont* dalam memberikan layanan kepada masyarakat, harus mampu mengembangkan *service quality*. Para pimpinan birokrat yang mengelola organisasi pemerintah harus mengidentifikasi proses internal dan proses pembuatan keputusan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, dalam rangka pengembangan kualitas antara lain: 1) pengembangan studi komprehensif mengenai harapan dan kepuasan masyarakat pada kinerja organisasi pemerintah, meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat memperbaiki kualitas komunikasi dan mengurangi birokrasi; 2) perbaikan kualitas jajaran pemimpin, mempertinggi komitmen SDM dan mendorong pengembangan motivasi, peningkatan standar jenis pekerjaan tertentu yang bersifat rutinitas dan penetapan tujuan yang ingin dicapai secara efektif; 3) memperjelas bagian kinerja, meningkatkan kesesuaian antar SDM, teknologi dan jenis pekerjaan, serta pendelegasian wewenang yang lebih luas terutama untuk unit kerja yang langsung berintegrasi dengan masyarakat; 4) pengembangan kelancaran komunikasi antar unit kerja, baik yang duduk sebagai fungsi maupun sebagai fungsi pendukung dan pemberian layanan yang konsisten secara internal, serta memberikan

perhatian yang besar pada aspek-aspek vital dalam pengembangan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari BSC, mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja instansi jangka panjang. Perspektif pelanggan dan proses internal mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting untuk mencapai keberhasilan saat ini dan masa depan, (Kaplan & Norton, 2000).

Dengan demikian, pengembangan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini adalah kemampuan sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi pemerintah, kemampuan sistem informasi untuk pembuatan keputusan, peningkatan motivasi dan pemberdayaan pegawai (aparatur pemerintah) dan yang terutama sekali adalah adanya keterkaitan antara hal-hal tersebut di atas.

2. Peran Pengelola Keuangan Daerah

a. Defenisi pengelola keuangan

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama

sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional. Apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Domai dalam (sari, 2009). Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah "pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

Menurut Halim (2006), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini keterangan dari pengertian pengelolaan keuangan daerah:

a. Perencanaan keuangan daerah

Menurut Ahmad (2004), perencanaan keuangan daerah terdiri atas:

1) Proses penyusunan APBD

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama

DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Jika strategi dan prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

2) Proses penetapan APBD

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut harus disampaikan kembali ke DPRD. Jika rancangan APBD sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui lagi, maka pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai pengurusan keuangan daerah.

3) Perubahan APBD

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka

waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

b. Pelaksanaan keuangan daerah

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah (Ahmad, 2004).

Dalam pelaksanaan keuangan daerah, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga, dan jasa dari penjualan, pengadaan barang atau jasa, penyimpanan uang daerah, dan penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaporan keuangan daerah

Menurut Halim (2007), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya terdiri dari:

- 1) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode.
- 2) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada satu tanggal tertentu.
- 3) Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
- 4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

d. Pertanggungjawaban keuangan daerah

Menurut Ahmad (2004), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai:

- 1) pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi
- 2) kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam satu bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri atas:

- 1) Laporan Perhitungan APBD
- 2) Nota Perhitungan APBD

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembayaran serta kinerja keuangan daerah, yang mencakup:

- a) kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran bersangkutan;
- b) kinerja pelayanan yang dicapai;
- c) bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
- d) bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD;
- e) posisi dana cadangan.

- 3) Laporan aliran kas
- 4) Neraca daerah

e. Pengawasan keuangan daerah

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan

dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2007). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan.

Tujuan utama pengawasan adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Halim (2007), tujuan pengawasan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah
- 2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- 3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Ahmad (2004), asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan kepatutan.

- b. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- c. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN.
- d. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- e. APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.
- f. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- g. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisien pengeluarannya.
- h. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,.

- i. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batasan tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- j. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut,
- k. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan APBD.
- l. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
- m. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- n. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- o. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- p. Dana cadangan diikuti dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai

kebutuhan seperti rehabilitasi, prasarana, keindahan kota, atau pelaksanaan lingkungan hidup, sehingga rehabilitasi tersebut dapat dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

3. Auditor Intern

a. Defenisi Auditor intern

Menurut Indra (2007) Audit merupakan proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi bukti /fakta yang berkaitan dengan tindakan ekonomis, dengan maksud untuk mengetahui tingkat “kewajaran” tindakan dan peristiwa ekonomis tersebut dan membuat kriteria tentang kewajaran tadi, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Sawyer (2005), audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dalam kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi, untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) resiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumberdaya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Auditor internal pada pemerintahan adalah inspektorat. Inspektorat daerah adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada bupati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten.

b. Fungsi Auditor Internal (Inspektorat)

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari fungsi pengawasan (inspektorat) adalah membantu pemerintah daerah dan SKPD dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Fungsi pengawasan (inspektorat) adalah:

- 1) Meriview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 2) Menentukan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional dilingkungan pemerintah daerah.
- 3) Meriview keandalan dan integritas informasi keuangan, operasional, dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- 4) Meriview sistem yang dibangun untuk memastikan ketaatan pada berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan

regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya, bila perlu memberikan saran kebijakan.

- 5) Meriview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah tersebut.
- 6) Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.
- 7) Meriview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 8) Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikandilakukan dengan cukup efektif.
- 9) Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 58 tahun 2009, inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit atau satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
2. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat
 Dalam melakukan riview atas laporan keuangan, auditor intern (inspektorat) harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk cataytan akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Ruang lingkup riview adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan kementrian negara atau lembaga yang bersangkutan. Sasaran riview adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas plaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan riview menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan, dan penyimpangan dari SAP dan peraturan lainnya, aparat pengawas intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang diriview. Entitas wajib menindaklanjuti hasil riview dan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil

koreksi kepada aparat pengawasan internal. Dalam hal entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode terkait/kelalaian, maka aparat pengawas intern menerbitkan pernyataan Telah Diriview dan paragraf penjelas yang mengungkapkan mengenai penyimpangan dari SAP dan peraturan terkait lainnya.

Proses riview atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses riview ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP yang akan menggambarkan kinerja suatu instansi. Jadi dengan adanya riview laporan keuangan, suatu entitas dapat memperbaiki laporan keuangan demi menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Berikut ini adalah peran auditor internal menurut *The Institut Of Internal Auditor* tahun 2004:

- 1) Tujuan kewenangan dan tanggungjawab

Tujuan kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan secara formal dalam karakter audit internal. Konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAUI) dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.

- 2) Memilih Independensi dan objektivitas

- a) Fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi.
 - b) Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan
 - c) Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang
- 3) Keahlian dan kecermatan fungsional
- a) Penanggungjawab fungsi audit internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh penugasannya
 - b) Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali dan menguji adanya indikasi kecurangan.
 - c) Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang resiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit harus berbasis teknologi informasi yang tersedia.
 - d) Audit internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang hati-hati dan kompeten

- e) Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan

4. Program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal

- a) Harus ada penilaian internal oleh fungsi audit internal secara berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi audit internal
- b) Adanya penilaian berkala yang dilakukan oleh pihak lain dari dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan praktek audit internal
- c) Adanya penilaian eksternal yang sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun oleh pihak luar perusahaan yang independen dan kompeten
- d) Penanggungjawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil penilaian dari pihak eksternal kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi
- e) Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan standar profesi audit internal.
- f) Auditor internal mengungkapkan kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap standar profesi auditor internal dan kode etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas audit internal secara signifikan

5. Pengelolaan fungsi audit internal

- a) Rencana penugasan audit internal harus independen berdasarkan penilaian resiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali
 - b) Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumberdaya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan
 - c) Penanggungjawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumberdaya fungsi audit internal sesuai, memadai dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah di uji
 - d) Penanggungjawab fungsi audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal
 - e) Penanggungjawab fungsi audit intrrnal harus menyampaikan laporan sercara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas. Perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggungjawab dan kinerja fungsi audit internal.
6. Lingkup penugasan
- a) Penugasan audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan resiko dan system pengendalian intern

- b) Fungsi audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas system pengendalian intern yang mencakup governance, kegiatan operasi dan system informasi organisasi
 - c) Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauhmana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi
 - d) Auditor internal harus mereview kegiatan operasi dan program untuk memastikan sampai sejauhmana hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
 - e) Untuk mengevaluasi system pengendalian intern diperlukan criteria yang memadai
 - f) Fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektifitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.
7. Pelaksanaan penugasan
- a) Auditor internal harus menetapkan sasaran untuk setiap penugasan
 - b) Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai
 - c) Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan
8. Komunikasi hasil penugasan
- a) Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan

- b) Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat
- c) Auditor internal harus merekomendasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan
- d) Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan staff

9. Pemantauan tindak lanjut

- a) Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi dan rencana tindakannya
- b) Komunikasi akhir hasil penugasan bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal
- c) Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi dalam komunikasi hasil penugasan terhadap kinerja yang memuaskan dan kegiatan yang direview
- d) Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak luar organisasi, maka pihak berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya
- e) Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu
- f) Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar

g) Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak

10. Resolusi penerimaan resiko dan manajemen

Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga system untuk memantau tindak lanjut hasil penugasandan telah dikomunikasikan kepada manajemen. Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung resiko yang tersisa (residual) yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi penanggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Herminingsih (2009) menguji tentang pengaruh partisipasi dalam anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini adalah partisipasi dalam anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila pengelola keuangan daerah berperan aktif dalam mengelola keuangan daerah yaitu dengan cara mengelola dan mengalokasikan dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dari hal tersebut kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan meningkat.

Dalam penelitian Natalia (2010) di kabupaten Tegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional dan peran manajerial pengelola keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Rohman (2007) meneliti tentang pengaruh peran manajerial pengelola keuangan daerah dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah dan pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Peran Pengelola Keuangan Daerah dengan kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Herminingsih (2009), kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan *value for money (economy, efficiency, effective)* apabila manajerial pengelola keuangan mampu mengorganisasikan dan mengelola sumber-sumber daya atau kekayaan yang terdapat pada suatu daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mencapai suatu tujuan disebut kinerja pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah secara terus-menerus mengelola dana publik sesuai dengan undang-undang dan aturan yang dikeluarkan, maka kinerja pemerintah daerah juga akan meningkat.

Menurut Mardiasmo (2002) untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan *value for money (economy, efficiency, effective)*

, perlu peningkatan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam penelitian Natalia (2010) di kabupaten Tegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional dan peran manajerial pengelola keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dan perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan kinerja agar tercapai kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Jadi dapat disimpulkan semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik kinerja suatu instansi.

2. Hubungan Auditor Intern dengan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut *Generally Accepted Government Auditing Standards* (GAGAS) dalam Guy (2003) bahwa pemeriksaan atas anggaran dan operasi pemerintah dimaksudkan untuk menguji apakah pengelola keuangan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan

kebijakan yang telah ditetapkan. Auditor intern dimaksudkan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja yang efektif (Sawyer's, 2003). Pengawasan (inspektorat) merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja yang telah ditetapkan (Yoza, 2010)

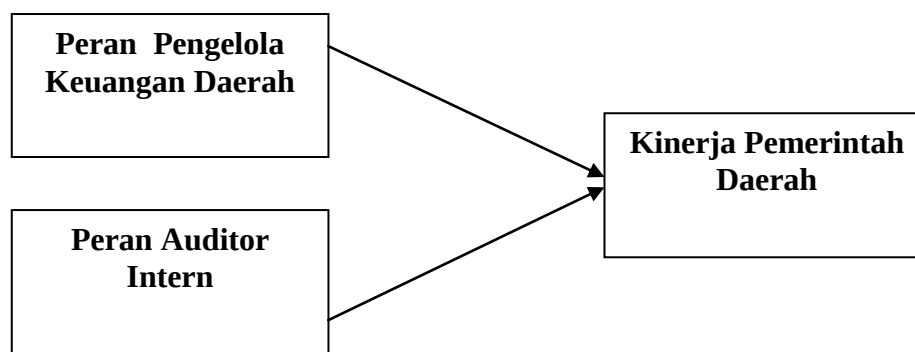
Auditor intern (inspektorat) melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten atau kota yang di danai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tujuan utama dari auditor intern tidak hanya melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik guna meningkatkan kinerja pemda.

D. Kerangka Konseptual

Kinerja pemerintah daerah akan meningkat apabila pengelola keuangan daerah berperan aktif dalam mengelola sumber-sumber daya atau keuangan yang ada di daerah tersebut. Begitu pula dengan auditor intern, apabila auditor intern melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi pihak-pihak yang terkait pada suatu instansi maka instansi itu akan bekerja pada prosedur yang telah ditetapkan, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Untuk memperbaiki kinerja

pemerintah daerah, diperlukan peran pengelola keuangan daerah, agar dana yang disediakan untuk berbagai kegiatan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan auditor intern (inspektorat), dengan adanya auditor intern yang bertugas sebagai pengawas internal dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka suatu instansi akan melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja yang efektif.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Peran pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₂ : Auditor intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh peran pengelola keuangan daerah dan auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Auditor intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Dimana dalam penelitian ini peneliti tidak menjadikan seluruh manajer yang ada di DPKAD sebagai responden, sehingga peran pengelola keuangan daerah belum menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
2. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan peran pengelola keuangan daerah dan peran auditor intern terhadap kinerja pemerintah daerah, seharusnya pemerintah daerah mengkaji ulang kembali peran dari pengelola keuangan daerah maupun peran auditor intern. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin. A Randa & Beasley, 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Boynton, William C. And Walter G. Kell. 2006. *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga
- Emil, Salvia Vera 2010. Pengaruh Pengawasan Internal dan Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- . 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Haluan. 2011. Masih Banyak Masalah Pengelolaan Keuangan. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal {2/12/2011}
- Herminingsih. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Tesis*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Ismet, Ramadhani. 2009. Pengaruh Peran Dewan Komisaris dan Auditor Internal Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang
- Kaplan, Robert S, dan David P. Norton. 2000. *Balance Scorecard*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mahsun, Sulistiyowati, dan Andre. 2006. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- . 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- . 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Metro, Headline Minangkabau News. 2011. Pengelolaan Keuangan Pemprov Kurang Memuaskan. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal {2/12/2011}

Mulyadi, dan Jhony. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Aditya Media.

Natalia. 2010. Komitmen Organisasional dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. “Prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah”

Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Rivai, Veithzal. 2008. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Robbins, Stephen P. 2008. *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Application*, New Jersey: Englewood Cliffs, A Simon & Schuster Company

Rohman, Abdul. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi* Vol.7, No. 206 – 220

Sari, Widia. 2009. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Padang. Universitas Negeri Padang

Sawyer's, Dittenhofer. 2003. *Sawyer's Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing*. Ed Florida: The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs.

———. 2005. *Sawyer's Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing*. Ed Florida: The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs.

Sri Rahmayanti. 2009. Pengaruh Penyusunan APBD dan Pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang

- Standar Akuntansi Pemerintahan, 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- .2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Padang, 13 Maret 2012

Yth. Bapak/Ibu Responden

di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya saya mendoakan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam karirnya. Amin.

Sehubungan dengan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir), untuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peran Pengelola Keuangan Daerah dan Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”**.

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya, karena hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk itu, saya berharap Bapak/Ibu dapat membantu dalam memberikan jawaban demi kelancaran penelitian ini. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda cek list (√) pada kolom pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang diberikan.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pihak Penerima

Hormat Saya,

(.....)

Etrawita
2008/00392

KUESIONER
IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/ibu mengisi daftar pertanyaan berikut:

- Nama : _____
- Umur : tahun
- Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
- Pendidikan terakhir : ☐ SMA ☐ D3
 ☐ S1 ☐ S2
 ☐ Lain-lain (.....)
- Lama Bekerja : tahun
- Jabatan : ☐ Kepala Bidang Perencanaan
 ☐ Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan
 ☐ Kepala Bidang Aset
 ☐ Kepala Bidang Pendapatan
 ☐ Kepala Bidang Lainnya

Daftar Pertanyaan

Untuk menjawab pernyataan di bawah ini, mohon bapak/ibu untuk memberi tanda

Check List (√) pada kolom dengan kriteria:

- a) Sangat setuju
- b) Setuju
- c) Ragu
- d) Tidak setuju
- e) Sangat tidak setuju

1. KINERJA PEMERINTAH DAERAH

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
A. Perspektif Keuangan						
1.	Dana yang tersedia selalu disesuaikan dengan setiap kebutuhan dalam pengeluaran					
2.	Alokasi anggaran biaya operasional secara keseluruhan memadai					
3.	Besarnya anggaran rutin dalam pembiayaan/pemberian pelayanan memadai					
4.	Kelancaran tugas aparat ditunjang dengan alokasi dana perjalanan dinas yang memadai					
5.	Ada system anggaran yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan dengan kontan penggunaan secara ketat					
B. Perspektif Proses Pelanggan						
6.	Pegawai bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan					
7.	Kantor mempunyai fasilitas ruangan dan saran yang memadai untuk kegiatan pelayanan					
8.	Pelayanan yang diberikan selalu tepat pada waktunya					
9.	Pegawai cepat dan tanggap dalam menyelesaikan setiap keluhan publik masyarakat					
10.	Pemerintah daerah selalu transparan dalam memberikan dan menerima informasi					
C. Perspektif Proses Internal						
11.	Terjalin hubungan yang baik dengan staf					
12.	Atasan bertindak cepat dan secara tegas memperbaiki dan mengarahkan cara kerja pegawainya					
13.	Setiap pegawai mendapat informasi mengenai perubahan-perubahan yang terdapat dalam instansi/organisasi					
14.	Pegawai dituntut lebih kreatif dan inovatif					
15.	Terjalin atau adanya komunikasi yang baik sesama rekan kerja					
D. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran						
16.	Terbuka kesempatan yang luas untuk setiap pegawai dalam melanjutkan pendidikan formal					
17.	Adanya kejelasan terhadap tanggung jawab dan wewenang setiap pegawai					
18.	Setiap kesempatan untuk pelatihan diinformasikan					

	dengan jelas dan terbuka kepada pegawai					
19.	Pegawai yang memiliki kualitas kerja yang baik atau tinggi diberikan penghargaan					
20.	Terbuka kesempatan yang besar bagi setiap pegawai untuk dapat mengikuti diklat/pelatihan					

2. PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
2.	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
3.	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir					
4.	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
5.	Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD					
6.	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan					
7.	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum					
8.	Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik					
9.	Dilakukannya <i>financial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah					
10.	Dilakukannya <i>value for money</i> audit terhadap laporan keuangan daerah					

3. AUDITOR INTERN (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Tujuan kewenangan dan tanggungjawab fungsi audit internal dinyatakan secara formal dalam program audit intern					
2.	Auditor intern memiliki akses komunikasi terhadap pimpinan dan dewan pengawas					

	organisasi					
3.	Auditor intern memiliki sikap mental yang objektif dan tidak memihak berbagai kepentingan					
4.	Auditor intern mendapat saran dan bimbingan dari pihak yang berkompeten					
5.	Auditor intern menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang hati-hati dan kompeten					
6.	Auditor intern menyelenggarakan proses memonitoring dan efektivitas program jaminan dan peningkatan kualitas secara keseluruhan					
7.	Penilaian dan fungsi audit internal melakukan penilaian yang berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi audit internal					
8.	Auditor intern melaporkan hasil penilaian dari pihak eksternal pada pimpinan dan dewan pengawas					
9.	Auditor intern menyusun perencanaan yang berbasis resiko untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal konsisten dengan tujuan organisasi					
10.	Rencana penugasan audit internal berdasarkan penilaian resiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali					
11.	Auditor intern menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit intern					
12.	Auditr intern membantu organisasi dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan resiko dan SPI					
13.	Auditor intern menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk peningkatan kinerja pemda					
14.	Mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai					
15.	Menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan					
16.	Mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan					
17.	Mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat					
18.	Komunikasi mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana					

	tindakannya					
19.	Menyusun dan menjaga system untuk memantau tindak lanjut penugasan yang telah dikomunikasikan dengan pihak manajemen					
20.	Apabila manajemen telah memutuskan untuk menanggung resiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima organisasi, penanggung jawaban fungsi audit internal mendiskusikannya dengan manajer					

Uji Pendahuluan

Reliability-Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,881	20

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
S1	4,4333	,62606	30
S2	4,0333	,88992	30
S3	4,3333	,66089	30
S4	4,4000	,62146	30
S5	4,4000	,67466	30
S6	4,2333	,77385	30
S7	4,3000	,65126	30
S8	4,0333	,85029	30
S9	4,0667	,73968	30
S10	3,9000	,80301	30
S11	4,3333	,66089	30
S12	4,4333	,62606	30
S13	4,3333	,71116	30
S14	4,4333	,62606	30
S15	4,2333	,56832	30
S16	4,2000	,76112	30
S17	4,2667	,58329	30
S18	4,2667	,58329	30
S19	4,5333	,50742	30
S20	4,5000	,50855	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	81,2333	51,633	,521	,875
S2	81,6333	49,826	,485	,877
S3	81,3333	52,092	,439	,877
S4	81,2667	52,892	,380	,879
S5	81,2667	52,685	,365	,880
S6	81,4333	50,530	,508	,875
S7	81,3667	50,447	,631	,871
S8	81,6333	49,137	,575	,873
S9	81,6000	50,317	,557	,874
S10	81,7667	51,289	,416	,879
S11	81,3333	51,264	,530	,875
S12	81,2333	50,668	,634	,872
S13	81,3333	50,230	,593	,872
S14	81,2333	50,806	,618	,872
S15	81,4333	52,668	,451	,877
S16	81,4667	52,533	,326	,882
S17	81,4000	52,800	,421	,878
S18	81,4000	52,800	,421	,878
S19	81,1333	52,464	,543	,875
S20	81,1667	52,971	,470	,877

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
85,6667	56,713	7,53078	20

Realibility-Peran Pengelola Keuangan Daerah (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,884	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
S1	4,4667	,57135	30
S2	4,4667	,50742	30
S3	4,5000	,50855	30
S4	4,3000	,65126	30
S5	4,3667	,61495	30
S6	4,3000	,59596	30
S7	4,4333	,50401	30
S8	4,4000	,49827	30
S9	4,3667	,55605	30
S10	4,4667	,62881	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	39,6000	12,593	,690	,868
S2	39,6000	13,145	,630	,873
S3	39,5667	12,944	,688	,869
S4	39,7667	12,116	,701	,867
S5	39,7000	13,183	,483	,884
S6	39,7667	12,806	,600	,874
S7	39,6333	12,999	,679	,869
S8	39,6667	13,057	,670	,870
S9	39,7000	13,045	,589	,875
S10	39,6000	13,076	,494	,883

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
44,0667	15,720	3,96479	10

Reliability- Auditor Intern

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,880	20

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
S1	4,4667	,62881	30
S2	4,3667	,66868	30
S3	4,3333	,71116	30
S4	4,4333	,56832	30
S5	4,4000	,67466	30
S6	4,2333	,81720	30
S7	4,2333	,67891	30
S8	4,0333	,85029	30
S9	4,1667	,74664	30
S10	4,2333	,72793	30
S11	4,3000	,59596	30
S12	4,3000	,83666	30
S13	4,3333	,71116	30
S14	4,4667	,62881	30
S15	4,2333	,56832	30
S16	4,2667	,52083	30
S17	4,3000	,53498	30
S18	4,2667	,58329	30
S19	4,5000	,57235	30
S20	4,5333	,50742	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	81,9333	48,202	,600	,871
S2	82,0333	48,999	,469	,875
S3	82,0667	47,582	,586	,871
S4	81,9667	50,447	,380	,878
S5	82,0000	49,310	,429	,876
S6	82,1667	46,902	,560	,872
S7	82,1667	47,454	,633	,869
S8	82,3667	46,033	,613	,870
S9	82,2333	48,323	,477	,875
S10	82,1667	48,902	,432	,876
S11	82,1000	49,610	,461	,875
S12	82,1000	47,541	,485	,875
S13	82,0667	49,168	,417	,877
S14	81,9333	47,513	,684	,868
S15	82,1667	49,730	,472	,875
S16	82,1333	50,326	,438	,876
S17	82,1000	50,645	,381	,878
S18	82,1333	50,257	,391	,877
S19	81,9000	50,576	,360	,878
S20	81,8667	50,326	,452	,876

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
86,4000	53,834	7,33720	20

**TABULASI ANGKET PENELITIAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Y)**

	Item Pertanyaan																				Σ
	KPD 1	KPD 2	KPD 3	KPD 4	KPD 5	KPD 6	KPD 7	KPD 8	KPD 9	KPD 10	KPD 11	KPD 12	KPD 13	KPD 14	KPD 15	KPD 16	KPD 17	KPD 18	KPD 19	KPD 20	
1	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	94
2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	69
3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	92
4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	87
5	4	4	4	5	5	5	4	4		4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	84
6	4	4	4	5	5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	74
7	5	5	5	4	5	5	5	3	4	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	92
8	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	96
9	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	3	3	3	4	4	75
10	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	96
11	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	95
12	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	88
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	83
14	4	2	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	5	4	3	5	5	4	4	83
15	4	4	5	5	5	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	87
16	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	93
17	4	4	4	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5	80
18	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	73
19	4	2	3	4	4	2	4	3	3	4	4	5	5	4	4	3	5	5	5	5	78
20	5	4	5	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	87
21	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97
22	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	79
23	4	4	4	4	3	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	86
24	5	3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	93
25	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	92
26	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	87
27	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	79
28	5	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	83
29	5	3	3	4	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	82
30	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	86

**TABULASI ANGKET PENELITIAN
AUDITOR INTERN(X2)**

Resp	Item Pertanyaan																				Σ
	AI 1	AI 2	AI 3	AI 4	AI 5	AI 6	AI 7	AI 8	AI 9	AI 10	AI 11	AI 12	AI 13	AI 14	AI 15	AI 16	AI 17	AI 18	AI 19	AI 20	
1	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	94
2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	69
3	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	93
4	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	3	4	89
5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	85
6	4	4	4	4	5	3	3	3	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	76
7	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	94
8	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	95
9	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	3	4	4	81
10	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	98
11	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	92
12	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	90
13	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	85
14	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	88
15	4	5	5	4	5	5	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	89
16	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	82
17	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	82
18	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	73
19	4	3	3	4	4	2	4	3	3	3	4	2	5	4	4	4	5	5	5	5	76
20	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	90
21	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97
22	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	79
23	4	4	4	4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	88
24	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	94
25	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	91
26	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	4	5	5	89
27	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
28	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	82
29	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	88
30	5	4	4	5	4	3	5	5	5	5	4	3	4	5	3	3	4	4	5	5	85

**TABULASI HASIL PENELITIAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Y)**

Resp	item pertanyaan																				Σ
	KPD 1	KPD 2	KPD 3	KPD 4	KPD 5	KPD 6	KPD 7	KPD 8	KPD 9	KPD 10	KPD 11	KPD 12	KPD 13	KPD 14	KPD 15	KPD 16	KPD 17	KPD 18	KPD 19	KPD 20	
1	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	2	5	4	4	4	4	4	86
2	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	3	84
3	5	5	5	5	5	4	2	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	72
4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	5	5	85
5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	91
6	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	84
7	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	91
8	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	77
9	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	94
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	98
11	4	4	2	4	4	5	2	2	2	4	4	4	2	4	4	2	4	2	2	2	63
12	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	94
13	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	81
14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	79
16	4	4	4	4	5	5	2	4	4	4	5	4	2	5	4	5	5	4	5	4	83
17	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	91
18	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	93
19	2	2	2	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	66
20	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	74
21	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3	86
22	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	89
23	2	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	90
24	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	5	5	3	4	4	83
25	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	88
26	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
27	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	4	84
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	81
29	2	2	2	4	4	5	2	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	73
30	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	80
31	2	2	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	72
32	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	81
33	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81
34	4	2	2	4	4	5	4	4	4	2	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	79
35	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	5	4	3	3	84
36	4	2	2	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	81
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	98
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	77
39	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	84
40	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	89
41	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	93
42	2	2	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	80
43	4	4	5	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	84
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
45	4	2	2	3	4	5	5	5	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	86
46	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	83
47	2	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	93
48	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	5	90
49	5	5	4	4	4	3	2	3	3	3	4	3	2	3	4	4	3	2	2	2	65
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	96
51	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	78
52	4	4	5	2	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	90
53	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	87
54	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	82
55	4	4	3	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	2	4	4	5	5	85
56	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	5	3	5	3	4	4	81
	224	222	219	226	248	257	230	228	233	237	252	245	221	246	248	232	242	228	235	226	

TABULASI HASIL PENELITIAN
PERAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (X1)

Resp	Item Pertanyaan										Σ
	PPKD 1	PPKD 2	PPKD 3	PPKD 4	PPKD 5	PPKD 6	PPKD 7	PPKD 8	PPKD 9	PPKD 10	
1	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	46
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	39
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
11	4	4	2	5	4	5	5	5	4	3	41
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	2	4	2	5	2	4	4	5	5	4	37
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	48
16	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
17	5	5	4	5	3	4	5	4	4	4	43
18	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	45
19	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	45
20	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	38
21	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
22	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	39
23	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43
25	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
26	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	44
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
29	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
30	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	48
31	5	5	3	3	5	5	4	5	5	3	43
32	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	43
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	37
35	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
36	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	43
37	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	48
38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
39	4	5	3	3	4	5	5	5	5	5	44
40	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
41	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	48
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
45	1	1	5	1	1	5	5	5	5	5	34
46	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	41
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
48	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	47
49	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	34
50	5	5	4	5	5	4	2	4	4	4	42
51	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	46
52	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	45
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
54	3	5	5	4	5	5	5	5	5	3	45
55	5	5	4	4	5	4	4	3	4	4	42
56	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4	45
	237	251	231	244	248	254	250	253	250	236	

TABULASI HASIL PENELITIAN AUDITOR INTERN (X2)

Resp	Item Pertanyaan																				Σ
	AI 1	AI 2	AI 3	AI 4	AI 5	AI 6	AI 7	AI 8	AI 9	AI 10	AI 11	AI 12	AI 13	AI 14	AI 15	AI 16	AI 17	AI 18	AI 19	AI 20	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	77
2	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
3	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83
4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	84
5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	5	4	81
6	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	88
7	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	82
8	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	84
9	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	83
10	5	4	5	5	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	82
11	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	4	4	86
12	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	83
13	4	4	5	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	83
14	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	77
15	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	76
16	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	87
17	4	2	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	3	78
18	4	4	5	2	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	81
20	5	5	5	4	4	5	3	3	5	5	2	5	5	4	4	4	4	4	3	5	84
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
23	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	78
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	84
26	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
28	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87
29	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
30	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	87
31	3	1	5	3	2	2	4	5	3	3	4	5	4	5	4	5	5	5	4	1	73
32	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	85
33	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	75
34	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	81
35	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	88
36	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	81
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
38	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	91
39	3	3	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	71
40	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	81
41	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	85
42	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	88
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
44	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
45	5	4	1	4	1	4	5	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1	5	5	66
46	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	83
47	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97
48	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	84
49	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	60
50	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	85
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	81
52	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	2	4	4	5	5	4	4	4	4	83
53	4	2	4	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	84
54	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	79
55	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	2	2	4	4	4	5	4	3	4	4	70
56	5	3	5	5	5	4	3	5	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	5	5	87
	237	206	243	225	238	230	232	229	223	226	218	224	228	226	229	236	231	231	239	231	

Tabel Distribusi Frekuensi Skor variabel Kinerja Pemerintah Daerah

No Item	SS		S		RR		TS		STS		Re rata	TCR (%)	Kategori
	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%			
1	14	25	34	60,7143	2	3,57143	6	10,7143	0	0	4	80	Baik
2	12	21,4286	37	66,0714	0	0	7	12,5	0	0	3,96429	79,2857	Baik
3	12	21,4286	35	62,5	1	1,78571	8	14,2857	0	0	3,91071	78,2143	Baik
4	15	26,7857	33	58,9286	3	5,35714	5	8,92857	0	0	4,03571	80,7143	Baik
5	24	42,8571	32	57,1429	0	0	0	0	0	0	4,42857	88,5714	Baik
6	35	62,5	19	33,9286	2	3,57143	0	0	0	0	4,58929	91,7857	Baik
7	22	39,2857	24	42,8571	4	7,14286	6	10,7143	0	0	4,10714	82,1429	Baik
8	13	23,2143	36	64,2857	5	8,92857	2	3,57143	0	0	4,07143	81,4286	Baik
9	17	30,3571	32	57,1429	6	10,7143	1	1,78571	0	0	4,16071	83,2143	Baik
10	17	30,3571	36	64,2857	2	3,57143	1	1,78571	0	0	4,23214	84,6429	Baik
11	29	51,7857	26	46,4286	0	0	1	1,78571	0	0	4,48214	89,6429	Baik
12	24	42,8571	29	51,7857	3	5,35714	0	0	0	0	4,375	87,5	Baik
13	12	21,4286	34	60,7143	5	8,92857	5	8,92857	0	0	3,94643	78,9286	Baik
14	25	44,6429	29	51,7857	1	1,78571	1	1,78571	0	0	4,39286	87,8571	Baik
15	26	46,4286	28	50	2	3,57143	0	0	0	0	4,42857	88,5714	Baik
16	18	32,1429	30	53,5714	6	10,7143	2	3,57143	0	0	4,14286	82,8571	Baik
17	23	41,0714	28	50	5	8,92857	0	0	0	0	4,32143	86,4286	Baik
18	12	21,4286	38	67,8571	4	7,14286	2	3,57143	0	0	4,07143	81,4286	Baik
19	20	35,7143	29	51,7857	5	8,92857	2	3,57143	0	0	4,19643	83,9286	Baik
20	16	28,5714	29	51,7857	8	14,2857	3	5,35714	0	0	4,03571	80,7143	Baik
Rerata	19,3	34,4643	30,9	55,1786	3,2	5,71429	2,6	4,64286	0	0	4,19464	83,8929	Baik

Tabel Distribusi Frekuensi Skor variabel Auditor Intern

No Item	SS		S		RR		TS		STS		Re rata	TCR (%)	Kategori
	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%	Fi	%			
1	16	28,5714	37	66,0714	3	5,35714	0	0	0	0	4,23214	84,6429	Baik
2	9	16,0714	29	51,7857	10	17,8571	7	12,5	1	1,78571	3,67857	73,5714	Baik
3	23	41,0714	31	55,3571	1	1,78571	0	0	1	1,78571	4,33929	86,7857	Baik
4	10	17,8571	39	69,6429	5	8,92857	2	3,57143	0	0	4,01786	80,3571	Baik
5	20	35,7143	33	58,9286	1	1,78571	1	1,78571	1	1,78571	4,25	85	Baik
6	15	26,7857	33	58,9286	7	12,5	1	1,78571	0	0	4,10714	82,1429	Baik
7	12	21,4286	40	71,4286	4	7,14286	0	0	0	0	4,14286	82,8571	Baik
8	12	21,4286	38	67,8571	5	8,92857	1	1,78571	0	0	4,08929	81,7857	Baik
9	8	14,2857	40	71,4286	7	12,5	1	1,78571	0	0	3,98214	79,6429	Baik
10	10	17,8571	39	69,6429	6	10,7143	1	1,78571	0	0	4,03571	80,7143	Baik
11	8	14,2857	38	67,8571	6	10,7143	4	7,14286	0	0	3,89286	77,8571	Baik
12	11	19,6429	36	64,2857	7	12,5	2	3,57143	0	0	4	80	Baik
13	9	16,0714	43	76,7857	3	5,35714	1	1,78571	0	0	4,07143	81,4286	Baik
14	9	16,0714	42	75	4	7,14286	0	0	1	1,78571	4,03571	80,7143	Baik
15	12	21,4286	38	67,8571	5	8,92857	0	0	1	1,78571	4,07143	81,4286	Baik
16	17	30,3571	36	64,2857	2	3,57143	0	0	1	1,78571	4,21429	84,2857	Baik
17	16	28,5714	34	60,7143	4	7,14286	1	1,78571	1	1,78571	4,125	82,5	Baik
18	15	26,7857	35	62,5	5	8,92857	0	0	1	1,78571	4,125	82,5	Baik
19	17	30,3571	36	64,2857	3	5,35714	0	0	0	0	4,25	85	Baik
20	13	23,2143	39	69,6429	3	5,35714	0	0	1	1,78571	4,125	82,5	Baik
Rerata	13,1	23,3929	36,8	65,7143	4,55	8,125	1,1	1,96429	0,45	0,80357	4,08929	81,7857	Baik

Regression-Uji Determinasi

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,470 ^a	,221	,191	7,19864

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40,474	12,414		3,260	,002
	X1	,694	,253	,386	2,737	,008
	X2	,159	,165	,136	,963	,340

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	73,6206	90,9339	83,9107	3,76122	56
Residual	-19,61906	12,84650	,00000	7,06654	56
Std. Predicted Value	-2,736	1,867	,000	1,000	56
Std. Residual	-2,725	1,785	,000	,982	56

a. Dependent Variable: Y

NPar Tests-Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,06654178
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,059
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,647
Asymp. Sig. (2-tailed)		,797

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Regression-Uji Multikolonearitas

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,470 ^a	,221	,191	7,19864

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	40,474	12,414		3,260	,002		
	X1	,694	,253	,386	2,737	,008	,740	1,352
	X2	,159	,165	,136	,963	,340	,740	1,352

a. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	778,073	2	389,036	7,507	,001 ^a
	Residual	2746,481	53	51,820		
	Total	3524,554	55			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlations^a

Model			X2	X1
1	Correlations	X2	1,000	-,510
		X1	-,510	1,000
	Covariances	X2	,027	-,021
		X1	-,021	,064

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2,992	1,000	,00	,00	,00
	2	,005	24,094	,39	,89	,04
	3	,003	30,262	,61	,10	,96

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	73,6206	90,9339	83,9107	3,76122	56
Residual	-19,61906	12,84650	,00000	7,06654	56
Std. Predicted Value	-2,736	1,867	,000	1,000	56
Std. Residual	-2,725	1,785	,000	,982	56

a. Dependent Variable: Y

Regression-Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Absut

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,024 ^a	,001	-,037	4,17650

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,543	2	,271	,016	,985 ^a
	Residual	924,486	53	17,443		
	Total	925,029	55			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Absut

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,827	7,202		,809	,422
	X1	-,025	,147	-,027	-,171	,865
	X2	,012	,096	,020	,125	,901

a. Dependent Variable: Absut

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	56	63,00	100,00	83,9107	8,00517
X1	56	34,00	50,00	43,8214	4,45220
X2	56	60,00	100,00	81,8214	6,82271
Valid N (listwise)	56				



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089
Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

Nomor : 1492/UN35.1.7/PP/2012
Lamp. : -
Hal : Penelitian

05 Maret 2012

Kepada : Yth. Kepala Kesbangpol Dan Linmas Provinsi
Jl. Kuini No. 79 A
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan proposal Skripsi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang berikut :

Nama : **Etrawita**
BP/NIM : 2008/00392
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

bermaksud akan melakukan penelitian pada Instansi yang dipimpin :

Judul Skripsi : PENGARUH PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN PERAN AUDITOR INTERN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH

Lama Penelitian : 3 Minggu

Sehubungan dengan itu mohon kiranya dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089
Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

Nomor : 1492/UN35.1.7/PP/2012
Lamp. : -
Hal : Penelitian

05 Maret 2012

Kepada : Yth. Walinagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman
Pasaman Barat

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan proposal Skripsi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang berikut :

Nama : **Etrawita**
BP/NIM : 2008/00392
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

bermaksud akan melakukan penelitian pada Instansi yang dipimpin :

Judul Skripsi : PENGARUH PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN PERAN AUDITOR INTERN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH

Lama Penelitian : 3 Minggu

Sehubungan dengan itu mohon kiranya dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005

Commitment is Our Tradition



Certificate No. ID08/1093



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

REKOMENDASI No.B.070/361/WAS-BKPL/2012 Tentang Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatra Barat Kepada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor : 1492/UN.35.1.7/PP/2012 tanggal 05 Maret 2012 Perihal Permohonan penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatra Barat yang dilakukan oleh :

Nama : ETRAWITA.
Tempat/Tgl Lahir : 6 Oktober 1989 Paraman Ampalu Pasaman Barat.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Jl. Walet No. 10 A Air Tawar Barat Padang.
No.Kartu Identitas : 2008 / 00392.
Judul Penelitian : PENGARUH PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PERAN AUDITOR INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH.
Lokasi Tempat Penelitian : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Dan Aset Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
Waktu Penelitian : 3 Minggu.
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 5 Maret 2012
AN. KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROV. SUMATERA BARAT
KASUBID PAM DAN WASPADNAS

MUZAHAH, S.SOS, MSI.
PENATA TKI.

NIP. 1968112219909 1 002.

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Sumatra Barat (sebagai laporan).
3. Sdr. Kepala DPKD Provinsi Sumatra Barat di Padang.
4. Sdr. Bupati /Walikota Sumatra Barat Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas Se Sumatra Barat.
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman Santur Kode Pos 27424 Telp. (0754) 61137 Fax. (0754) 62466

REKOMENDASI

Nomor : B.070/1681 /BKP-PBD/SWL/2012

**TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Setelah mempelajari Rekomendasi dari Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/361/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : **ETRAWITA**
Tempat / Tgl Lahir : Paraman Ampalu, Pasaman Barat / 06 Oktober 1989
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM/BP : 00392 / 2008
Alamat : Jalan Walet No. 10 A, Air Tawar Barat, Padang.
Lama Penelitian : 3 Minggu (3 s.d 24 April 2012)
Judul : Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Lokasi/Tempat Penelitian : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey yang akan dilaksanakan.
2. Memberitahukan kedatangan dan maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian kepada Pemerintah Daerah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Sawahlunto Cq. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto.
5. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin kegiatan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Sawahlunto, 3 April 2012

**AR. WALIKOTA SAWAHLUNTO
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PBD
KOTA SAWAHLUNTO**



**Dis. GUSPRIADI, MM
NIP. 19660809 199403 1 006**

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat ;
Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Padang;
2. Bapak Walikota Sawahlunto di Sawahlunto (sebagai laporan);
3. Bapak Unsur Muspida se Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Dekan Fakultas Ekonomi UNP di Padang;



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 17 telp. (0754) 20186
MUARO SIJUNJUNG – 27511

Website <http://www.Sijunjung.go.id> email : pdet@sijunjung.go.id

REKOMENDASI

Nomor : B.070/12/KPL/IV-2012

Tentang Izin Penelitian

Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat Nomor: B.070/36/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Izin Melaksanakan Penelitian, setelah dipelajari pada prinsipnya kami menyetujui maksud tersebut yang di lakukan oleh :

N a m a	: ETRAWITA
Tempat / Tgl. Lahir	: Paraman Ampalu/6 Oktober 1989
Pekerjaan/P.Studi	: Mahasiswi/Akuntansi
Alamat	: Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor Kec.Gunung Tuleh
Nomor Identitas	: 131906061089089
Judul Penelitian	: " Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah "
Lokasi Penelitian	: DPKD Kabupaten Sijunjung.
Waktu Penelitian	: 20 April s/d 11 Mei 2012
Anggota	: --

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan Studi yang bersangkutan.
2. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat/instansi yang dituju sebelum dan diakhir proses penelitian.
3. Peneliti agar menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Daerah cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas kabupaten Sijunjung.
5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dianggap pelanggaran dan kepada Peneliti dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

Muaro Sijunjung, 19 April 2012

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN SIJUNJUNG



Tembusan Yth;

1. Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas di Padang.
2. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung (Sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447

Nomor : 070/292/IP /KP3M/2012
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Arosuka, 26 Maret 2012
Kepada,

Yth. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset

di_
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Rekomendasi dari Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Sumatera Barat No.B.070/361/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : **ETRAWITA**
Tempat / Tgl. Lahir : Paraman Ampalu/ 06 Oktober 1989
Alamat : Jl. Walet No.10 A Air Tawar Padang
Nomor Identitas : 131906061089089
Judul Penelitian : **"Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah".**
Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)
Waktu Penelitian : 26 Maret s/d 16 April 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA
Kasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

NURHASTI YENNI, SH
NIP. 19651128 199203 2 002

busan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Sumbar di Padang
3. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Aro Suka
4. Yth. Sdr. Dekan Fak. Ekonomi UNP di Padang
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
**KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

Jl. Veteran No 1. Telp./Fax. 0752 - 66354, Padang Baru - Lubuk Basung, Kode Pos. 26415
<http://www.agamkab.go.id> E-mail : kpmppt@agamkab.go.id Sms Center 08126612111

REKOMENDASI

Nomor : B.070/202/KPMPT-Ag/2012

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Setelah mempelajari surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor: B.070/361/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ **penelitian**/ observasi/ Pengambilan Data/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama	: ETRAWITA
Tempat/Tanggal Lahir	: Paraman Ampalu Pasaman Barat / 06 Oktober 1989
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jl. Walet No. 10 A Air Tawar Barat Padang
Nomor Kartu Identitas	: 2008/00392
Judul Penelitian	: Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Lokasi Penelitian	: DPPKA Kab. Agam
Waktu Penelitian	: 22 Maret s/d 12 April 2012
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Lubuk Basung, 22 Maret 2012
29 Rabiul Akhir 1433 H

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU,**


FATIMAH, S.Sos, M.Si
Pembina

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala DPPKA Kab. Agam di Lubuk Basung.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.05.487/Kesbangpol/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Surat dari Kasubid.Pam dan Waspadnas Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumbar.

Nomor : B 070/361/Was-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 14 Maret 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: ETRAWITA
Tempat/Tanggal Lahir	: Paraman Ampalu Pasaman Barat, 06 Oktober 1989
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di Padang	: Jl.Walet No.10 A Air Tawar Barat
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Waktu/Lama Penelitian	: 3 (tiga) minggu
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: DPKA Kota Padang
Anggota Rombongan	:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 14 Maret 2012

An. KEPALA

KANTOR KESATUAN BANGSA



NIP.. 19630227 198509 1 002

Diteruskan Kepada Yth,

1. Kepala DPKA Kota Padang
2. Yang bersangkutan.
3. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat: Jl. Lintas Sumatera Km.05 Sungai Dareh 27573
Telp. (0754) 40153, Fax. (0754) 40153

Nomor : 070/046/Kesbangpol/III-2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI**

Sungai Dareh, 19 Maret 2012

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelola Keuangan Daerah Kab.
Dharmasraya
di -

Pulau Punjung

Berdasarkan Surat Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat nomor B.070/361/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Rekomendasi Izin Kepada:

Nama : **ETRAWITA**
Tempat/Tgl, lahir : Paraman Ampalu, 6 Oktober 1989
Alamat : Jl. Walet No. 10 A Air Tawar Barat Padang
NIM : 2008/00392
Judul Proposal : **"PENGARUH PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PERAN AUDITOR INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH"**
Tempat Penelitian : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya
Waktu Penelitian : $\pm$ 1 (satu) minggu

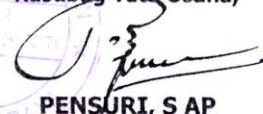
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari Kerangka serta Tujuan Penelitian.
2. Memberitahukan Kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat Keterangan yang berhubungan dengan Penelitian, baik kepada daerah setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi segala Peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Menyampaikan Laporan Hasil Survei dalam bentuk Laporan Hasil penelitian kepada Bupati Dharmasraya Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Kasubag Tata Usaha,


PENSURI, S AP

NIP. 19650105 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Cinduo Mato No.13 Telp : (0753) 466546
SIMPANG AMPEK

REKOMENDASI
NO. 070 / 361 / KESBANGPOL / 2012

TENTANG
IZIN PENELITIAN

Kami atas nama Bupati Pasaman Barat setelah mempelajari Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Barat, Nomor. B. 070 / 361 / WAS – BKPL / 2012, tanggal 13 Maret 2012, perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud tersebut di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh:

Nama : ETRAWITA
Tempat / Tgl Lahir : 06 Oktober 1989 Paraman Ampalu Pasaman Barat
Alamat : Jl. Walet No. 10A Air Tawar Barat Padang
No. Kartu Identitas : 2008/00392
Judul Penelitian : “Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”
Lokasi Penelitian : Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat
Waktu Penelitian : April 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan kajian;
2. Memberitahukan pada pemerintah setempat;
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat;
4. Mengirimkan hasil kajian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bapak Bupati Pasaman Barat c.q. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kabupaten Pasaman Barat;
5. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi akan dicabut kembali.

Demikian rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 2 April 2012

Bupati Pasaman Barat
KEPALA KANTOR



YUDESRI, S.IP, M.Si
NIP. 19731210 199303 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan),
2. Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Raya Dr. Soetami Telp/Fax. (0755) 7575 113

REKOMENDASI

NO: 070/ / Kesbang / IV - 2012

Berdasarkan Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor : 1492/UN.35.1.7/PP/2012 tanggal 05 Maret 2012 dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Sumatera Barat Nomor : B.070/36/WAS-BKPL/2012 Tanggal : 13 Maret 2012 tentang **Mohon Izin Penelitian**, memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **ETRAWITA**
NIM/BP : 2008/00392
Tempat/Tanggal Lahir : Paraman Ampalu/ 06 Oktober 1989
Semester/Jurusan : VIII/Akutansi
Alamat : Jl. Walet No.10 A Air Tawar Padang
Judul Penelitian : **Pengaruh Peran Manajeral Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**
Lokasi Penelitian : **DPPKAD Kab Solok Selatan**
Waktu Penelitian : 10 April s/d 24 April 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA maupun kepada institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan Laporan Hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Solok Selatan Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian akan dicabut dan batal demi hukum.

Demikianlah Rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Aro, 09 April 2012

KEPALA


AKHIRMAN, SE
NIP. 195807161979031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumbar Cq Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/343/KESBANGPOL/2012

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan rekomendasi Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/36/WAS-BKPL/2012 perihal Izin Melaksanakan Penelitian, tanggal 13 Maret 2012 perihal Surat Rekomendasi Penelitian/ Survei Lapangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian/ Survei Lapangan dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **ETRAWITA**
Tempat/Tgl. Lahir : Paraman Ampalu/ 6 Oktober 1989
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Walet No. 10 A Padang
Kartu Identitas : KTP. 131906061089089
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"PENGARUH PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PERAN AUDITOR INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH"**
Lokasi Penelitian : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
W a k t u : 5 April s.d 30 April 2012
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian/ Survei Lapangan tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian/ Survei Lapangan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian/ Survei Lapangan agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 5 April s.d 30 April 2012.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 5 April 2012
An KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TATA USAHA

EVAWATI ZAKARIA, S.Sos
NIP.197208181992022001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. A.Yani Nomor 19 Telp. (0753) 20588 Lubuk Sikaping 26313

REKOMENDASI

No. 200/ 124/ Kesbangpol-2012

TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

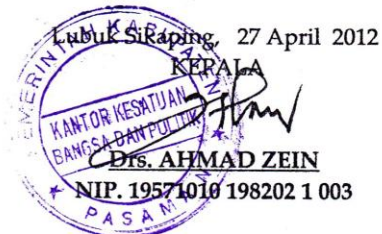
Kami Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Prov.Sumatera Barat Nomor. B. 070/136/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Izin Melaksanakan Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ETRAWITA
Tempat/Tgl Lahir : Paraman Ampalau, 6 Oktober 1989
Alamat : Jln. Walet No.10 Air Tawar Barat Padang
Judul Penelitian : *"Pengaruh Peranan Manejerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah)."*
Tempat Penelitian : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pasaman
Waktu Penelitian : 26 April 2012 s/d 10 Mai 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan judul penelitian
2. Dalam melakukan penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil laporan penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pasaman
3. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
4. Sdr. Yang Bersangkutan
5. Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp.Fax (0752) 94155 / 94097

REKOMENDASI

Nomor : 300/114/BKBP-LK/III/2012

Tentang

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumbar di Padang, Nomor : B.070/361/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012, perihal : Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama	: ETRAWITA
Tempat/Tanggal Lahir	: Paraman Ampalu Pasaman Barat / 6 Oktober 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Walet No. 10 A Air Tawar Barat Padang
Nomor Induk Mahasiswa	: 2008 / 00392
Judul Penelitian	: Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Lokasi Penelitian	: Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian	: 29 Maret s/d 13 April 2012

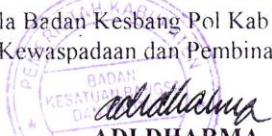
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 29 Maret 2012

An. Kepala Badan Kesbang Pol Kab Lima Puluh Kota
Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat


ADI DHARMA
Pembina / 19681016 198903 1 003

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumbar di Padang
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Bagindo Azis Chan No. 72, Telp. (0751) 91115, Pariaman

= SURAT REKOMENDASI =

Nomor : B.070/266/KKP/2012

Tentang

Izin Melakukan Penelitian/Survey

Berdasarkan surat dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/361/was-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian/Survey yang dilaksanakan/dipimpin oleh :

Nama : **ETRAWITA.**
Tempat / Tgl Lahir : Paraman Ampalu, 6 Oktober 1989.
Pekerjaan : Mahasiswi.
No. Kartu Identitas : 131906061089089.
Alamat : Jl. Walet No. 10 A Air Tawar Barat Padang.
Judul : **" Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah "**.
Lokasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Padang Pariaman.
Waktu Penelitian : 21 Maret s/d 13 April 2012.
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian/Survey.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Saudara yang akan melaksanakan Penelitian/Survey dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Instansi terkait.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil Penelitian/Survey sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Pariaman, 21 Maret 2012

An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Tata Usaha



MURNIATI
NIP. 195911171980032006

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Prop. Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat.
2. Bpk. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
3. Bpk. Dandim 0308 Padang Pariaman.
4. Bpk. Kapolres Pariaman.
5. Bpk. Kepala Dinas Padang Pariaman.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Mr. Asaat No. 14, Lapangan Kantin Kota Padang Panjang
Telp. ☎ (0752) 485395 Fax. 📠 (0752) 485395

REKOMENDASI

Nomor : 070/72/KPPT-PP/III-2012

Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian

Setelah mempelajari Surat dari Bapak Kasubid PAM Dan WASPADNAS Badan Kesbang Pol Dan Linmas Prov. Sumatera Barat Nomor : B.070/1361/WAS-BKPL/2012 Tanggal 13 Maret 2012 perihal Izin Penelitian maka dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian / Permintaan Data di Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh:

N a m a	: ETRAWITA
Tempat /Tanggal Lahir	: Paraman Ampalu, 6 Oktober 1989
Alamat	: Jl. Walet No. 10 A Padang .
No. Kartu Identitas	: 131906051089089
Pekerjaan	: Mahasiswi
Judul Penelitian	: "Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah"
Lokasi Penelitian	: DPPKAD Kota Padang Panjang
Lama Penelitian	: 15 Maret s/d 5 April 2012

Dalam rangka mengadakan penelitian, peneliti diwajibkan/diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti harus melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian.
2. Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.
3. Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Padang Panjang melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
4. Peneliti dilarang melakukan penelitian di luar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang di tempat penelitian.
5. Apabila penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 15 Maret 2012

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG PANJANG



NULDRYMAN, SH,MM

Pembina Tk.I / NIP. 19670205 199312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Kepala DPPKAD Kota Padang Panjang.
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 074/225 /KB-KPL/2012

Kami Walikota Bukittinggi, berdasarkan :

Surat Dari : Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat

Nomor : B/070/361/WAS-BKPL/2012

Tanggal : 5 Maret 2012

Dengan ini memberikan kesempatan melakukan penelitian/survey kepada :

Nama	: ETRAWITA
Tempat/Tgl Lahir	: Paraman Ampalu Pasbar / 06 Oktober 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Walet No.10 A Padang
Nomor Identitas	: 2008/00392
Judul Penelitian	: Pengaruh Peran Manajemen Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Lokasi/Tempat Penelitian	: DPKAD Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	: 28 Maret s/d 13 April 2012
Anggota Peneliti	: -
Digunakan Untuk	: Penyusunan skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat Izin Melaksanakan Penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah Penelitian kepada Walikota Bukittinggi c/q Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Bukittinggi cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penelitian selesai.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Bukittinggi, 28 Maret 2012

An. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesbang



AHMAD RUSTAM
NIP. 19590424 198101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

Jalan Nasri Nasar No. 1 Pariaman Telp/Fax. 0751-93938

Nomor : 070/140 /KPL/IV-2012
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Penelitian/Survey**

Pariaman, 04 Maret 2012

Kepada Yth :
Bapak Kepala DPPKA Kota
Pariaman
di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/136/WAS-BKPL/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Izin Melaksanakan Penelitian, bahwa akan menghadap kepada Bapak/Ibu dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Pengaruh Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah"** yang dilakukan oleh:

Nama : ETRAWITA
NIK : 131906061089089
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jorong Paraman Ampalu Kec. Gunung Tuleh Pasbar
Lokasi Penelitian : DPPKA Kota Pariaman
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

Demi kelancaran proses penelitian, diharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan informasi/data yang memungkinkan guna membantu kelancaran proses penelitian tersebut, dan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian;
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian kepada pejabat instansi terkait, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian;
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Mengirim laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Pariaman c/q Kantor Kesbangpol & Linmas Kota Pariaman;
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

**KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA PARIAMAN**

Mewakili,

AZMAR AZIZ

NIP. 19570205 198103 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman sebagai Laporan
2. Dandim 0308 Padang Pariaman di Pariaman
3. Kapolresta Pariaman di Pariaman
4. Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY

No. : 570/143/KPMPT-PS/Pnlt/IV/2012

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, telah mempelajari surat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor : 1492/UN35.1.7/PP/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian / Survey / Observasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh :

Nama	: ETRAWITA
NIM	: 2008 / 00392
Program Study / Jurusan	: S1/ Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Padang
Judul Penelitian / Survey / Observasi	: Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Lokasi Penelitian	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Waktu Penelitian	: 16 April – 7 Mei 2012.
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat di wilayah tempat melakukan Penelitian/Survey
2. Penelitian/Survey tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan.
3. Segera melaporkan setelah berakhir Penelitian pada pejabat di wilayah tempat melakukan Penelitian/Survey dan pada pejabat yang mengeluarkan izin Penelitian/Survey
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat di lokasi Penelitian/Survey.
5. Bila Terjadi Penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka surat izin ini di cabut kembali.

Demikian izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 16 April 2012

Kepala



Tembusan :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pessel.
3. Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP.
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Sri Rejeki No. 5 Kel. Bulakan Balai Kandi Telp./Fax. (0752) - 95713 Kota Payakumbuh 26225

REKOMENDASI

Nomor. 200/ B.070/57/BKB-PBD/2012

**TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan :

Surat Masuk dari : Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Nomor : 1492/UN35.1.7/PP/2012
Tanggal : 05 Maret 2012
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Dengan ini memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengambilan data kepada :

N a m a : **ETRAWITA**
Tempat/Tgl Lahir : Paraman Ampalu, 6 Oktober 1989
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Walet No. 10. A Padang
Kartu Identitas : 131906061089089
Maksud/Tujuan : Pengambilan Data Untuk Bahan Penyusunan Skripsi dengan judul
"Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah"
Lokasi : DPPKA Kota Payakumbuh
Waktu : 28 Maret s/d 13 April 2012
Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan penelitian
2. Memberitahukan / melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas / Kantor / Instansi setempat dan menjelaskan maksud kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu.
3. Mematuhi semua Peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil karya ilmiahnya sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.
5. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka surat keterangan / Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Payakumbuh, 28 Maret 2012
**An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**
Kabid Pengendali Program,
Rehabilitasi dan Kontruksi

KUSRIDA EFF. B.Sc
NIP. 19610825 198603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kaban Kesbang Pol Linmas di Padang



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KESBANG POL & LINMAS

Jl. KS.Tubun No.49 ☎ 0755-325796

KOTA SOLOK

REKOMENDASI

Nomor : B.070/164/BKPL/III/2012

Tentang :
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL & LINMAS) Kota Solok, setelah mempelajari Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Nomor: 1492/UN35.1.7/PP/2012. Tanggal 05 Maret 2012 perihal Penelitian, maka dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh:

Nama	: ETRAWITA
Tempat/Tanggal Lahir	: Paraman Ampalu / 06 Oktober 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Walet No.10.A Air Tawar Barat Padang
Bukti Identitas / No. KTP	: 131906061089089
Maksud dan Tujuan	: Izin Penelitian
Lokasi Penelitian	: DPPKA Kota Solok
Waktu Penelitian	: 3 (tiga) Minggu
Anggota Penelitian	: -
Judul Penelitian	: Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Peran Auditor Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Instansi/Badan/Lembaga/Perusahaan yang dihubungi.
3. Melaporkan diri kepada Walikota Solok Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Solok setelah selesai melakukan penelitian.
4. Mengirim laporan hasil penelitian kepada Walikota Solok Cq. Badan Kesbang Pol Linmas Kota Solok.
5. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat setempat.
6. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu diharapkan kepada Instansi/Badan/Lembaga/Perusahaan dan Perorangan yang dihubungi dapat membantu seperlunya.

Solok, 26 Maret 2012

An.KEPALA BADAN
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



RATNAWATI, SH, MM

NIP. 19650516198602 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka DPPKA Kota Solok.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip